

**IMPLEMENTASI PROGRAM BATUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) BAGI
KELUARGA PENERIMA MANFAAT STUDI DI KELURAHAN SUNGAILIAT
KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA**

Aulia Nurmalita Sari

NPP. 29.0451

*Asdaf Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: auliasari277@gmail.com

ABSTRACT (in english)

Problem Statement/Background (GAP): The poverty rate in Indonesia is very high, especially in 2020. Even though poverty reduction is one of the goals of the Sustainable Development Goals. Therefore, the government provides a Non-Cash Food Assistance program to the community in order to help the poor to fulfill some of their food needs. Sungailiat Village is one of the villages that has received assistance since 2018 but in its implementation there are still several obstacles. **Purpose:** to find out the implementation process, supporting factors and inhibiting factors of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in Sungailiat Village, Sungailiat District, Bangka Regency. **Method:** descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. Data analysis techniques used include data reduction, data presentation and drawing conclusions **Result:** the implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) policy for Beneficiary Families in Sungailiat Village, Sungailiat District, Bangka Regency from the standard dimensions and policy objectives is in accordance with existing regulations, from the aspect of policy resources, characteristics between institutions, inter-institutional communication and the attitude of the implementer policies have not run optimally. Aspects of the social, economic and political environment of the community support and feel helped by the BPNT program. The obstacles experienced in this program are the occurrence of lost or damaged combo cards, data updates that are not up to date. Limited resources coupled with public awareness. **Conclusion:** Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the BPNT program for beneficiary families in the Sungailiat Village, Sungailiat District, Bangka Regency has not been optimal. This is because there are still obstacles in the distribution of the BPNT program.

Keywords: Implementation, Non-Cash Food Assistance (BPNT), Beneficiary Families (KPM)

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Angka kemiskinan di Indonesia sangat tinggi terlebih pada tahun 2020. Padahal penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tujuan *Sustainable Development Goals*. Oleh karena itu, pemerintah memberikan program Bantuan Pangan Non Tunai kepada masyarakat demi membantu masyarakat miskin untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan. Kelurahan Sungailiat merupakan salah satu kelurahan yang menerima bantuan sejak 2018 namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. **Tujuan:** untuk mengetahui proses implementasi, faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. **Metode:** metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan antara lain reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** pelaksanaan kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Keluarga Penerima manfaat di Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dari dimensi standar dan tujuan kebijakan telah sesuai dengan peraturan yang ada, dari aspek sumber daya kebijakan, Karakteristik antar Lembaga, komunikasi Antar Lembaga dan sikap pelaksana kebijakan belum berjalan secara optimal. Aspek lingkungan sosial, ekonomi dan politik masyarakat mendukung dan merasa terbantu dengan adanya program BPNT. Hambatan yang dialami dalam program ini yaitu terjadi kartu kombo yang hilang atau rusak, pembaharuan data yang tidak *up to date*. sumber daya yang terbatas ditambah dengan kesadaran masyarakat. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program BPNT bagi keluarga penerima manfaat di kelurahan sungailiat kecamatan sungailiat kabupaten bangka belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya hambatan hambatan dalam penyaluran program BPNT.

Kata kunci: Implementasi, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Keluarga Penerima Manfaat

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Angka kemiskinan di Indonesia meingkat ada awal tahun 2020 dikarenakan terjadinya pandemic covid-19. Sebagai upaya penanganan fakir miskin. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan program dan menciptakan suatu kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat yang mempunyai atau tidak mempunyai mata pencaharian serta yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam realisasinya usaha pemerintah yang telah dilakukan sejak lama masih terdapat beberapa kendala seperti program IDT atau BLT dikarenakan program ini hanya mengedepankan aspek perekonomian saja. Berdasarkan masih tingginya angka kemiskinan pemerintah mulai membuat program yang berfokus untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu dalam bentuk kebutuhan pangan. Program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan kepada penduduk miskin bertujuan agar penduduk miskin mendapat cukup gizi. Pemerintah membuat sebuah kebijakan yang terealisasi dalam netuk penyaluran beras untuk keluarga miskin dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran per bulan dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam bentuk beras, Program RASKIN dihentikan pada tahun 2015 dikarenakan terdapat banyak masalah dalam proses penyalurannya, program RASKIN diganti menjadi program beras untuk keluarga sejahtera.

Menurut kementerian social, pergantian nama program RASKIN menjadi RASRA dengan tujuan membuat masyarakat lebih sejahtera melalui bantuan beras dengan subsidi. Program RASRa

tidak berlangsung lama, pada tahun 2017 melalui kebijakan Peraturan presiden RI Nomor 63 Tahun 2017 Kemensos menggantinya program RASTRA menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai yang biasa disebut proram BPNT. Pengalihan program ini agar menciptakan 6T dalam system penyalurannya yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi. Program BPNT sudah mulai berjalan pada tahun 2017 di 44 kota termasuk Bangka Belitung.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kuota penerima program BPNT di Kabupaten Bangka berjumlah 11.094 KPM namun pada realisasinya penerima melampaui batas yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 11.652 KPM sehingga pada tahun 2021 kuota ditambah akan tetapi jumlah penerimanya tidak sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Hal ini memperlihatkan bahwa belum tepat sasaran program BPNT di Kabupaten Bangka. Kecamatan Sungailiat merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bangka pada tahun 2020 jumlah keluarga miskin berjumlah 3.732 pada tahun 2021 masih belum ada perbaharuan dari DTKS mengenai jumlah penduduk miskin di Kecamatan Sungailiat. Jumlah keluarga miskin di Kecamatan Sungailiat merupakan jumlah terbanyak.. Indikator tepat waktu masih belum dikatakan optimal dan menjadi penghambat karena masih ditemukan laporan dari KPM bahwa dana yang seharusnya ditransfer pada tanggal 10 setiap bulan malah terlambat dan pada saat pengecekan saldo KKS masih kosong. Selanjutna indicator tepat harga tepat kualitas dan tepat jumlah masih terdapat beberapa kendala seperti harga bahan pangan yang tidak menentu. Jumlah e-warong yang seharusnya 2 namun di kelurahan sungailiat hanya 1 dan hanya memiliki mesin EDC 1 jika terjadi eror pada mesin maka hal ini menjadi hambatan dalam penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari oleh beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, antara lain yaitu Artkel jurnal dalam jurnal administrasi publik yang ditulis oleh Eko Yudianto Yunus pada tahun 2019 yang berjudul “**Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo**”. Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang memiliki persamaan dengan penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu dari teori yang digunakan dalam penelitian dari eko yudianto menggunakan teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn sedangkan factor yang mempengaruhi dianalisis dari teori George C. Edwards III. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu tujuan program BPNT belum berjalan dengan semestinya yaitu ketepatan sasaran dan penerimaan BPNT bagi KPM. Keadaan masyarakat belum baik karena banyak warga penerima manfaat memiliki pendidikan rendah dan buta huruf sehingga dalam pelaksanaan penyaluran program BPNT mengalami hambatan.

Selanjutnya, jurnal artikel dalam jurnal respon publik yang ditulis oleh Dionita Putri Anwar, Nurul Umi Ati, dan Roni Pindahanto pada tahun 2020 yang berjudul “**Implementasi Program bantuan pangan NonTunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulang Kemiskinan Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota**” Adapun metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan

wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang memiliki persamaan dengan penelitian ini. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada bagian penggunaan teori, penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn sedangkan penelitian ini menggunakan teori dari Mazmanian dan Sabatier. Adapun hasil penelitian yaitu Karakteristik masalah dalam pelaksanaan program BPNT melalui *e-warong* di Kelurahan Sisir masih nihil adanya masalah. Karakteristik Program dalam pelaksanaan Program BPNT dinilai sudah tepat sasaran karena SDM di Kelurahan Sisir sudah memenuhi tugas dan fungsinya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam Program BPNT sudah mendukung dalam pelaksanaannya.

Penelitian selanjutnya dari jurnal administrasi publik dan pembangunan yang ditulis oleh Halimatul husna, emma ariyani, trisylna azwari yang berjudul “**Implementasi Program Sembako di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin utara**” pada tahun 2021. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara pengumpulan dokumen terkait dan observasi yang memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dalam penggunaan teori, penelitian yang akan dilakukan menggunakan Van Meter Van Horn namun penelitian sebelumnya menggunakan teori implementasi dari Mazmanian dan Sabatier. Adapun hasil penelitian dari segi mekanisme pelaksanaan Sudah berjalan dengan baik sesuai dengan pedoman umum namun ada beberapa faktor penghambat masih terdapat beberapa KPM yang saldo di KKSnya masih kosong sehingga tidak bisa mengambil manfaat.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni menggunakan teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn dan penelitian dilaksanakan disaat terjadinya pandemic covid-19 dimana angka kemiskinan meningkat drastis. Dengan adanya pandemic covid-19 maka masyarakat juga memiliki kebiasaan baru yaitu menjaga jarak dll. Demi menjaga Kesehatan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi BPNT dan menganalisa factor pendukung dan penghambat dalam implementasi program BPNT di Kelurahan Sungailiat Kabupaten Bangka.

II. METODE (5-10%)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Menganalisa data melalui model miles dan Huberman yaitu menganalisis data kualitatif dengan pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 19 orang informan terdiri atas Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Perlindungan dan Sosial, Kepala Seksi Pengelolaan Data Fakir Miskin, Korda BPNT Kabupaten Bangka, Pengawas program BPNT di

Kecamatan, Lurah Sungailiat/ Sekretaris Lurah Sungailiat, Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sungailiat, Pemilik *e-warong*, dan Masyarakat Penerima Manfaat. Adapun pengumpulan data Kualitatif dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat serta melihat data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil. Adapun analisisnya menggunakan teori implementasi yang digagas dari Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa implementasi dapat dikatakan berhasil apabila dipengaruhi ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, dan Kecenderungan pelaksana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)

Penulis menganalisis dan mendapatkan gambaran mengenai implementasi program BPNT menggunakan teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn yaitu bahwa implementasi dipengaruhi oleh ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, dan Kecenderungan pelaksana. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Keberhasilan suatu kebijakan terletak pada sejauh mana standar dan tujuan kebijakan dapat direalisasikan. Oleh karena itu standar dan tujuan kebijakan harus jelas demi tercapainya tujuan. Program pemerintah pasti memiliki suatu ukuran dan tujuan dalam pelaksanaannya. Keberhasilan dalam pelaksanaan program dapat dinilai dari ukuran dan tujuan kebijakan yang nanti akan dijadikan pedoman oleh para stakeholders. Proses implementasi program Bantuan pangan Non Tunai disusun atas dasar regulasi kelembagaan dari kementerian sosial.

Pihak kelurahan memedomani permensos dalam melihat tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan program BPNT. Tujuan program BPNT ini untuk membantu masyarakat yang telah terdaftar di DTKS dalam mengurangi pengeluaran belanja bahan pangan per bulannya dan memberikan pemenuhan gizi. Hal ini juga diatur dalam Permensos Nomor 20 Tahun 2020. Tujuan dari program Bantuan Pangan Non Tunai yaitu untuk memberikan manfaat kepada keluarga penerima manfaat dengan cara mengurangi beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

3.2. Sumber Daya Kebijakan

a. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai maka Kelurahan Sungailiat dan Dinas Sosial diharuskan mempunyai sumber daya manusia yang berkompeten dalam bekerja berdasarkan jenjang keahlian yang dimiliki

Data pegawai Kelurahan Sungailiat

Jenis Kepegawain	Jenjang Pendidikan					
	SD	SMP	SMA/SMK	D I	S1	S2
Pegawai Kelurahan	-	-	1	-	6	-
Tenaga Kontrak	-	-	5	-	1	-
Jumlah	-	-	6	-	7	-

Data pegawai Dinas Sosial

Jenis Kepegawain	Jenjang Pendidikan						
	SD	SMP	SMA/SMK	D II	D III	S1	S2
PNS	1	-	7	1	2	16	4
Jumlah							31

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahawa jumlah pegawai Kelurahan Sungailiat dan Dinas Sosial memiliki tangga Pendidikan yang berbeda-beda dengan tingkat Pendidikan terendah yaitu SMA/SMK sedangkan di Dinas Sosial memiliki tingkat Pendidikan yang beragam dengan tangga Pendidikan tertinggi pad ajenjang S2 dan yang terendah yaitu sekolah dasar.

Banyaknya penduduk msikin yang berada di Kelurahan Sungailiat sehingga program BPNT ini lebih banyak dariada kelurahan lain. Dengan banyaknya jumlah penerima program BPNT dan dengan jumlah pegawai terbatas maka Sumber Daya Manusia di Kelurahan Sungailiat masih belum optimal

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sumber daya sarana dan prasarana berkaitan dengan ketersediaan fasilitas untuk daya dukung dalam pelaksanaan program ataupun kebijakan sehingga dapat berhasil mencapai tujuannya kelengkapan dan ketersediaan jumlah sarana dan prasarana akan semakin mempermudah penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di lapangan. Sarana dan prasarana akan semakin mempermudah penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di lapangan. Saran dan prasarana dalam pelaksanaan program BPnt ini berupa ketersediaan e-warong, mesin EDC, kartu KKS. Mengenai sarana dan prasarana yaitu ketersediaan e-warong. Dalam pedoman program BPNT 1 e-warong terdapat maksimal 250 KPM namuan di Kelurahan Sungailiat dituju oleh 507 KPM dikarenakan e-warong yang kedua masih tahap pemangaunan.

c. Sumber Daya Financial

Tanpa adanya sumber daya financial sebuah program tidak dapat berjalan. Pengimplementasian program agar dapat berjalan pastie rat kaitannya dengan ketersediaan dana dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pendanaan program Bantuan Pangan Non Tunai bersumber dari dana APBN dan pada saat pandemic covid-19 dana yang diberikan untuk bantuan social semakin besar maka dari itu ada perluasan penerima program BPNT.

3.3. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan

Pertama dilakukan sosialisasi kepada perangkat desa dan kelurahan terkhusus kepala seksi kesejahteraan mengenai kriteria calon KPM BPNT selanjutnya masing-masing desa dan kelurahan memasukkan data DTKS yang akan dikirim ke dinas social kepada kementerian social selanjutnya akan ditetapkan SK penerima BPNT. Selanjutnya diserahkan kepada pendamping social BPNT. Sosialisasi rutin dan berkala diberikan setiap bulan kepada pihak e-warong mengenai kualitas dari bahan pangan yang akan disiapkan ole e-warong dan mengenai sistempenyalurannya.

Informasi yang diteruskan ke masyarakat maupun pihak terkait disampaikan dengan baik melalui sosialisasi secara rutin dan berkala setiap bulannya. Bentuk Kerjasama dan koordinasi yang baik dari dinas social, kelurahan, korda dan pendamping lalu kepada penerima manfaat diharapkan mamu mempercepat perbailan kendala yang dialami pada pelaksanaan program non tunai ini. Terkait dalam pemberian sanksi kepada pelaksana atau KPM yang tidak mematuhi aturan terhadap pelaksanaan program BPNT. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan asas umum pemerintahan yang baik.

Apabila terdaat laporan ata ditemukan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program BPNT akan dikenakan saksi administrative sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila terjadi elanggaran yang dilakuakan oleh tenaga pelaksana BPNT maka akan ditindak lanjuti sesuai dengan aturan dan surat keputusan oleh e-warong, bank penyalut berhak mencabut izin penyaluran manfaat program BPNT dan melaporkan kepada pemerintah daerah. Hal ini memberikan kesimpulan yaitu dalam pelaksanaan program Bpnt di Kabupaten Bangka Belitung belum pernah ada laporan penyimpangan yang dilakukan oleh tenaga pelaksana.

3.4 Karakteristik Organisasi Pelaksana

Tidak cukup menggambarkan jumlah pelaksana dalam implementasi kebijakan namun lebih dari itu yaitu mengenai karakteristik badan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tersebut ke masyarakat. Struktur Organisasi di Dinas Sosial sudah diduduki oleh pegawai yang sesuai kompetensi masing masing. Akan tetapi masiht terdapat kekurangan pegawai sehingga kami merekrut pegawai honorer sebanyak 19 orang yang sesuai dengan kriteria dan kemampuan yang dibutuhkan. Peraturan yang ada dalam organisasi maupun dalam pelaksanaan sebuah kebijakan merupakan pedoman yang mendasari pelaksanaan kegiatan. Tingkat kepatuhan dari para pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bangka maupun Kelurahan Sungailiat sangat tinggi hal ini dapat dilihat dari ketepatan kehadiran di kantor pada saat apel pagi. Pengawasan dilakukan secara rutin dan berkala dari dinas social dilakukan monitoring pada saat penyaluran bahan pangan dan pada saat tidak dilaksanakan penyaluran juga tetap dilakukan monitoring dalam rangka pembinaan anggota e-warong

3.5 Kondisi Social, Ekonomi, Dan Politik

Program mendapat tantangan apabila tidak memperhatikan kondisi social, ekonomi dan politik di masyarakat yang menjadi sasaran dari program tersebut. Banyak masyarakat kelurahan sungailiat yang berada di bawah garis kemiskinan sehingga banyak dari mereka yang ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah. Perangkat kelurahan dibantu dengan pendamping dan juga PSM sudah berusaha semaksimal mungkin agar seluruh masyarakat di Kelurahan Sungailiat yang mempunyai perekonomian rendah supaya mendapatkan bantuan social. Tetapi kelurahan hanya bisa mengusulkan warga tersebut untuk masuk ke DTKS, dan yang menentukan apakah akan mendapatkan bantuan yaitu kementerian Sosial.

3.6 Sikap Kecenderungan Para Pelaksana Kebijakan

Komponen pelaksana kebijakan harus membahas model kebijakan dan disaring berdasarkan persepsi pelaksana dalam menyampaikan dan melaksanakan kebijakan. Setiap bulan dinas social mengadakan sosialisasi secara rutin yang dihadiri oleh kasi kesejahteraan dan social, anggota e-warung, korda BPNT dan pendamping agar program berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai arahan dan tugas masing masing sesuai dengan SOP. Pada pelaksanaan sosialisasi para pelaku kebijakan selalu hadir dan ikut berpartisipasi agar program kebijakan dapat dilaksanakan secara lancar.

Dalam pelaksanaan kebijakan perlu adanya respon dari pelaksananya baik respon positif maupun respon negative. Respon positif berarti mendukung adanya program/kebijakan yang dijalankan sebaliknya jika respon yang diberikan negative maka menentang adanya program tersebut. Namun dalam pelaksanaan program merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mendukung agar tercapai tujuan dari program tersebut.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai bagi keluarga penerima manfaat memberikan banyak dampak positif seperti sangat membantu mengurangi biaya pengeluaran masyarakat penerima manfaat dan juga memenuhi kebutuhan gizi agar terhindar dari gizi buruk. Program BPNT juga merupakan salah satu sarana pendukung demi melaksanakan sustainable development goals. Penulis menemukan temuan penting bahwa pelaksanaan program BPNT ini sangat membantu dan memfasilitasi masyarakat serta meningkatkan ekonomi bagi masyarakat miskin yang terpilih sebagai anggota e-warung dikarenakan di Kabupaten Bangka menggunakan system e-warung kube. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya bahwa program BPNT ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat. Para pendamping BPNT dan anggota e-warung merupakan kunci berjalannya program BPNT di Kelurahan Sungailiat.

Sebuah program kebijakan tidak luput dari hambatan maupun kekurangan dalam pelaksanaannya, begitupun program BPNT yang masih memiliki beberapa hambatan, diantaranya sarana dan prasarana seperti e-warung yang tidak sesuai dengan pedoman umum program BPNT, kartu KKS hilang maupun saldo kosong, terbatasnya pembantu pelaksana kebijakan, data penduduk miskin yang tidak terbaru, rendahnya kesadaran masyarakat, dan jaringan internet di tempat pelaksanaan. Selanjutnya karakteristik dari program ini yakni program yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian Sosial, jadi yang membuat menarik lagi adalah alokasi anggaran dari APBN dan

dukungan oleh pusat serta adanya dorongan motivasi imbalan yang diberikan pemerintah pusat kepada pendamping BPNT dan Korda BPNT. Hal ini yang membuat pendamping BPNT dan Korda BPNT selalu mengupayakan pelaksanaan program BPNT berjalan dengan baik.

Adanya program ini juga diharapkan secara jangka panjang memberantas angka gizi buruk yang dialami oleh masyarakat menengah kebawah, mencerdaskan anak bangsa sehingga dapat menaikkan tingkat SDM, membantu meningkatkan perekonomian bagi keluarga penerima manfaat,

IV. KESIMPULAN (5-10%)

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan program BPNT belum berjalan secara optimal dikarenakan masih terdapat hambatan hambatan yang mengganggu dalam pelaksanaan program. Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat dilihat bahwa hambatan terbesar berada pada dimensi sumber daya kebijakan. Pelaksana kebijakan selain memerankan pegawai TKSK, pendamping BPNT dan korda BPNT sebagai kunci berjalannya program, ketersediaan bahan pangan di e-warung juga mempengaruhi. Adapun program BPNT besar manfaatnya yaitu Rp. 200.000 diperuntukkan untuk ditukar di e-warung dengan sumber karbohidrat, sumber vitamin, sumber protein dan sumber mineral. Adapun manfaat program BPNT bagi keluarga penerima manfaat. Sarana prasarana yang dimiliki oleh Kelurahan Sungailiat dalam pelaksanaan program BPNT masih kurang dimana seharusnya 1 kelurahan memiliki 2 e-warung namun pada kenyataannya Kelurahan Sungailiat hanya memiliki 1 e-warung begitu pula halnya dengan mesin EDC. Namun hal ini dapat sedikit teratasi dengan baik karena dalam pelaksanaan program dibarengi dengan komunikasi para pelaksana dan sikap pelaksana dalam mengatasi masalah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni dalam waktu pelaksanaan penelitian yang relative singkat dengan hanya 2 minggu sehingga peneliti hanya terfokus pada pelaksanaan program BPNT secara umum.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program BPNT dengan pembahasan lebih luas seperti dampak dari pelaksanaan program BPNT, efektivitas program BPNT terhadap sasaran program.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Lurah Sungailiat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: PUSTAKA SETIA Bandung.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Harahap, Nursapia. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rustanto, Bambang. 2015. *Menangani Kemiskinan*. Bandung: PT Remaja Rosdaka
- Siyoto, Sandu dan Sodik, M Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metode Penelitian Pemerintahan Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susyanto, Badrun. 2020. *Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak Covid-19*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI.
- Suwartono. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Usman, Husaini., Akbar, Purnomo Setiady. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Van Meter, Donalds and Carl E. van Horn. 1975. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework". *Administration and Society*, Vol.6 No. 4 February
- William N. Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

Jurnal dan Artikel

- Anwar, D. P., Ati, N. U., & Pindahanto, R. 2020. *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu*. *Respon Publik*, 14(3), 1-7.

- Cahyat, A. 2004. *Bagaimana kemiskinan diukur?: beberapa model pengukuran kemiskinan di Indonesia*. Bogor: Center for International Forestry Research, CIFOR
- Eko Yudianto, Y. 2019. *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo*.
- Ferezagia, D. V. 2018. *Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Sosial HUMANIORA Terapan, 1(1).
- Fitriyani, Egi. 2021. *Implementasi Peraturan Presiden No 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Di Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
- Heryana, Ade., 2018. *"Informan Dan Pemilihan Informan Pada Penelitian Kualitatif"*. Jakarta Barat: Universitas Esa Unggul.
- Husna, H., Ariyani, E., & Azwari, T. 2021. *Implementasi Program Sembako Di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara*. Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan, 3(1), 57-63.

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (BSNT)
- Peraaturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

Sumber Lain

- Pedoman umum program BPNT tahun 2018
- Pedoman umum program BPNT tahun 2019

Pedoman program sembako tahun 2020

Provinsi Bangka Belitung dalam angka 2021

Provinsi Bangka dalam angka 2021

<https://sitompulramos.wordpress.com/2014/04/18/108/>, pada tanggal 22- September 2021

[Menteri Sosial Ubah Nama Raskin Jadi Rastra \(kompas.com\) diakses pada 20 September 2021](#)

babel.antaraneews.com di akses pada tanggal 1 September 2020

<https://regional.kompas.com/read/2019/03/14/16021981/di-bangka-belitung-jokowi-menemui-penerima-pkh-dan-bpnt>

<http://pusdatin.kemensos.go.id/bantuan-pangan-non-tunai-bpnt> diakses pada tanggal 5 April 2022

